

**STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DESA
KEPUHARJO, KECAMATAN KARANGPLOSO, KABUPATEN
MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



Disusun Oleh:

Anselmus U. T. Magang

NIM. 2019210074

**KOMPETENSI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2023

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memilih strategi pengelolaan Town Possessed Ventures yang berdampak langsung terhadap dukungan sosial pemerintah yang diberikan kepada warga Kota Kepuharjo, Lokal Karangploso, dan Peraturan Malang. Strategi adalah potensi aksi yang membutuhkan pilihan yang dibuat oleh manajemen senior dan sumber daya perusahaan untuk mengartikulasikan tujuan dan nilai organisasi secara efektif di masa depan. Untuk penelitian ini, penelitian kualitatif digunakan. Baik informasi yang diperlukan maupun informasi tambahan merupakan sumber data untuk penyelidikan ini. Pertemuan, persepsi, dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan informasi dalam penelitian ini. Inspeksi purposif adalah pendekatan untuk jaminan saksi. Pengumpulan informasi, pengurangan informasi, tampilan dan pemeragaan informasi, dan penarikan akhir atau konfirmasi adalah teknik pemeriksaan informasi yang digunakan dalam penyelidikan ini. Temuan investigasi menunjukkan bahwa program Town Owned Venture telah berhasil dilaksanakan tetapi belum memiliki peluang untuk mengubah secara signifikan bantuan sosial pemerintah daerah kota Kepuharjo karena belum memiliki peluang untuk menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan kota lebih lanjut. ekonomi. Ada komponen pendukung, khususnya pihak-pihak yang sepenuhnya siap menjadi sponsor keuangan dalam pelaksanaan program Town Claimed Venture. Tidak adanya sumber daya kota dan SDM daerah adalah penghalang.

Kata kunci: Strategi, Kesejahteraan sosial

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah perkotaan harus memiliki kesempatan berharga untuk mengelola keterbatasan aset mereka dengan membentengi daerah melalui Badan Usaha Milik Kota (BUMDes), karena penduduk perkotaan adalah kekuatan pendorong di belakang pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. BUMDes merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan pemerintah dengan bantuan dana metropolitan; ini bertujuan untuk meningkatkan rasa pemenuhan di antara orang Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan dengan menumbuhkan rasa kebersamaan.

BUMDes tidak menerima dana dari pemerintah kota karena mempromosikan inisiatif lingkungan dan menjunjung tinggi konsep otonomi. Akibatnya, sebagian besar uang riil berasal dari lingkungan sekitar. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Town Guaranteed Tries dapat membantu pihak-pihak eksentrik seperti pemerintah atau kelompok lain yang tidak dikenal untuk membantu BUMDes.

Tugas yang harus dikelola oleh BUMDes melalui pengamalan pemikiran kota sebagai perkumpulan tertinggi di kota adalah:

1. Meningkatkan manfaat BUMDes masyarakat dan pemerintah daerah
2. Membantu mengawasi pelaksanaan operasi ekonomi lokal
3. Membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki masyarakat untuk menjadi sumber ekonomi.
4. Bergabung dengan media desa untuk mempromosikan tujuan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi.

Strategi untuk menggerakkan ekonomi lokal yang memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat dikenal dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMDes). Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab mengelola BUMDes, menurut Yudiardi.

Tidak, menurut Permendagri 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan organisasi perangkat daerah yang didirikan oleh pemerintah kota yang bertugas mengelola dan memiliki aset. Town Claimed Endeavours adalah entitas komersial yang dikelola langsung oleh pemerintah kota dan penduduk lokal dengan tujuan meningkatkan ekonomi lokal. Untuk bekerja pada dukungan pemerintah yang ramah di kota, mereka diciptakan dengan mempertimbangkan kemampuan dan persyaratan kota.

BUMDes dirancang antara lain untuk meningkatkan Kompensasi Unik Kota (PADes), sesuai dengan Perda Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan memahami tanggung jawab dan perannya dalam mengelola perekonomian di daerah provinsi, BUMDes seharusnya memiliki pilihan untuk berkembang menjadi lembaga keuangan yang berbeda dengan organisasi kewilayahan pada umumnya. BUMDes dapat mencoba untuk memenuhi kepuasan kerabatnya dengan cara ini sebagai lembaga keuangan lingkungan.

Bantuan sosial pemerintah daerah merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan suatu kelompok atau negara. Suatu bangsa hanya dianggap berhasil jika semua warganya memiliki rasa kekayaan materi, spiritual, dan sosial yang sama, memberi mereka kebebasan untuk hidup dengan benar, membuat pilihan swadaya, dan terlibat dalam pelayanan publik.

Bantuan pemerintah, menurut James Midgley, terdiri dari tiga (tiga) unsur, yaitu memenuhi kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan memberikan kesempatan yang luar biasa untuk maju (Midgley, 1995).

Namun demikian, memperoleh bantuan sosial pemerintah untuk perorangan merupakan tantangan, terutama dalam kasus Indonesia, negara kepulauan dengan luas wilayah geografis 1,905 juta km². Sehubungan dengan hal tersebut, pasal keempat UUD 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi kehidupan dan keamanan rakyat Indonesia, meninggikan derajat bantuan pemerintah yang diberikan kepada perseorangan, dan memberikan pendidikan kepada rakyat. Masalah meningkatnya ketimpangan di Indonesia baik secara kualitas maupun kuantitas terlihat pada mereka yang masih jauh dari kata sejahtera dan banyaknya individu yang merasa tidak nyaman karena hambatan pekerjaan sosial.

Selain itu, terdapat kendala dalam pengelolaan bansos pemerintah karena kurangnya SDM yang mengakibatkan kurangnya dukungan masyarakat setempat terhadap bansos pemerintah.

BUMDes 4 Tahun 2015 bertujuan untuk membentuk organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani potensi keuangan kota, seperti Permendes PDT dan Keimigrasian No. dan Transmigrasi No.1 dan Permendes PDT. Dengan cara ini, BUMDes sebagai asosiasi keuangan kota harus memiliki opsi untuk melihat peluang dan potensi yang dimiliki kota dengan berkolaborasi dengan kota dan pihak luar sehingga mereka dapat menawarkan peluang yang signifikan dan memperluas asosiasi pasar untuk meningkatkan lingkungan untuk memulai bisnis peluang berharga. dan lebih mendorong perekonomian. Perekonomian kota menyebar, dan masyarakat setempat membuat terobosan kecil namun konsisten. Akibatnya, saya dapat menyatakan bahwa meskipun pemerintah telah mengelola kampanye yang berbeda untuk sementara waktu, tidak satu pun dari mereka yang memiliki kesempatan untuk memberikan hasil yang diinginkan. Faktor yang berbeda bertanggung jawab atas kegagalan program ini. Misalnya, meskipun campur tangan pemerintah sangat persuasif, hal itu juga menghambat pertumbuhan dan

keaktivitas penduduk, yang keduanya sangat penting untuk menopang perekonomian kota. Orang semakin bergantung pada bantuan pemerintah karena struktur dan operasi yayasan keuangan tidak efektif di daerah pedesaan, yang menguras energi mereka. Pedoman (Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 2016).

Bagaimanapun, antisipasi penuh untuk menempatkan BUMDes yang tidak sepenuhnya didirikan dalam Permendes, dapat dikatakan bahwa pekerjaan BUMDes belum beroperasi sebagai bantuan keuangan kota dengan menyelesaikan bantuan sosial pemerintah, karena selama ini BUMDes hanya diburu-buru. Untuk membangun Pendapatan Asli Daerah (PADes), dan jarang kita dapatkan masyarakat Perkotaan yang menjadikan BUMDes sebagai bantuan mengikis bantuan rumah pemerintah.

Ideologi BUMDes dibangun atas tiga gagasan di jantung masyarakat pedesaan:

1. Meskipun merupakan komponen komersial, tujuan Bumdes tidak hanya menghasilkan uang; ia juga ingin memberikan konten bantuan kepada penduduk setempat (sebagai perpanjangan dari PEMDES) dan melakukan inisiatif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan ekonomi lokal.
2. Daripada mengambil alih kegiatan ekonomi yang sebelumnya dilakukan oleh warga, sebaiknya BUMDes mendirikan yang baru, menambah nilai dari yang sudah ada, atau menggabungkan yang sudah ada.
3. BUMDes as Friendly Undertaking, sebuah yayasan korporasi yang dirancang untuk mengatasi kepedulian sosial melalui penciptaan nilai tambah melalui Making Worth, mengelola potensi dan sumber daya dari Overseeing Worth, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada warga Conveying Worth.

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan BUMDes diatas maka peneliti mengambil judul **“STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

MASYARAKAT DESA KEPUHARJO, KECAMATAN KARANGPLOSO, KABUPATEN MALANG.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan ilustrasi di atas, strategi untuk bergerak maju dengan masalah ini adalah:

1. Bagaimana Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kepuharjo dalam memajukan kesejahteraan sosial bagi warganya?
2. Di Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, seberapa efektif unsur pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat?

1.3. Tujuan penelitian

1. Mempelajari bagaimana mengelola usaha milik desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi warga Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, dan Kabupaten Malang.
2. Mengidentifikasi unsur pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

1.4. Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis

Melalui program Town Possessed Ventures, peninjauan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang sangat penting dan bermanfaat bagi kemajuan pengelolaan Kebijakan di bidang Pemerintahan Kota serta menjadi sumber informasi dan pengetahuan.

2. Secara Praktis

- a. BUMDes Mekar Mandiri Kota Kepuharjo berharap temuan investigasi ini dapat membantu proses perbaikan BUMDes. Dengan demikian, BUMDes Kota Kepuharjo

dapat menggunakan informasi ini sebagai perspektif untuk menjalankan program bisnis secara lebih efektif.

- b. Temuan investigasi ini dimaksudkan untuk menjadi rekomendasi atau sumber daya untuk administrasi negara kota lainnya dalam membentuk atau mengembangkan BUMDes di kota mereka sesuai dengan harapan di kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandler. 1962. Pendidikan Akuntansi Indonesia. 6, 1/2008:27
- David, Fred R. 2011. *Strategic Management*, Buku 1. Edisi 12 Jakarta
- Ghunu, Agustinus, dkk. 2021. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa. 6/(1)2021:53
- Midgley. 1995. Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan. *Sosial Work Jurnal*, 6, (1): 139
- Samadi, dkk. 2013. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. 2015/2, (1).
- Sinambella. (2006). *Reformasi pelayanan publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
- Suhady. (2005). *Dasar-dasar Good governance*. Jakarta: UNDP
- Yudiardi, Dodi. 2015. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian masyarakat Perdesaan Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmu Sosial*, 2015
- Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.